

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat oleh karena itu Kepercayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah harus di imbangi dengan kinerja yang baik (Dian Puspita,2018:68). Salah satunya pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk selalu tanggap dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan (Monika Septia,2020).

Pada pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Rizon Hidrayadi,2015).

Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas (Sutrisno, 2010:170).

Kinerja juga merupakan suatu gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian,2006:274). Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Wibowo,2011:229).

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan salah satu kunci keberhasilan SKPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena kinerja yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik (Mohamad Mahsun, 2012:25). Penilaian terhadap kinerja manajerial SKPD menjadi hal yang sangat penting karena penilaian kinerja manajerial akan membantu mengoptimalkan organisasi sektor publik terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi sektor publik (Amartadewi, 2013). Di mana menurut Ermawati (2017) yang dikutip oleh Agus, kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan

dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Agus Wahyudi, 2019).

Menurut Kenis (1979) dikutip oleh Bangun. Kunci kinerja manajerial efektif apabila tujuan dari anggaran tercapai (Bangun, 2009). Anggaran seharusnya tidak hanya sebagai alat penilaian kerja, perencanaan dan pendapatan dalam pusat pertanggung jawaban dalam suatu organisasi, disisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan serta mengevaluasi dan memotivasi bawahan (Mardiasmo,2004). Perencanaan adalah penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan standar, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Handoko, 2013: 23).

Dalam suatu perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi, anggaran merupakan komponen terpenting yang ada di dalamnya (Mardiasmo, 2009: 61). Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009: 67).

Oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi Faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Kenis (1979) dikutip oleh Hayatul Hikmah mengungkapkan kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran (Hayatul Hikmah,2019). Tujuan dan sasaran anggaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja

(Andreson,2015). Kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik memudahkan pemerintah menyusun rencana kerja dengan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah daerah (Muhammad Zein, 2016). Dan penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik yang akan mendorong staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja (Miftahul Janah, 2015).

Kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam strategi daerah (Renstrada) dan program pembangunan daerah (Propeda) (Bastian, 2006:24). Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target anggaran yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah (Pangumbalerang,2014).

Faktor kedua adalah akuntabilitas publik, Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang bertanggungjawab untuk menyajikan, lalu melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas yang menjadi tanggungjawab pada pihak yang memberi amanah yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2013:8). Karena Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi yang merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Fadli, 2017). Pelaporan keuangan pemerintah

pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku dan penggunaan dana telah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana termuat dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Yusri,2012).

Akuntabilitas akan memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Bastian,2010:385). Maka masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan dan program yang terjadi di pemerintah dan adanya akuntabilitas publik tentunya agar kinerja manajerial dapat meningkat karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi (Darmawan,2016).

Fenomena yang pertama terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Pither Tjuandys (Sekretaris Komisi III DPRD KBB) Menyatakan bahwa beberapa SKPD yang pengawasannya menjadi kewenangan Komisi III. Karena tidak terealisasikan tujuan anggaran yakni honor uang saku sebesar Rp93.250.000 yang masih utuh atau belum dibayarkan dan Penyerapan anggaran jangka waktu semester satu, penyerapan anggaran baru sekitar 30% dan beberapa item kegiatan penyerapan anggarannya masih 0%, diduga karena tujuan anggaran yang tidak ditetapkan secara jelas dan spesifik yang menyebabkan Kinerja Manajerial SKPD berjalan tidak efektif. (Adi

Haryanto,2018). Padahal tujuan anggaran harus dibuat secara terperinci spesifik, jelas dan dapat dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan (Handayani, 2018:4).

Fenomena kedua yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yakni Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat, kurang pro aktif dalam melaporkan hasil kinerjanya dalam satu tahun kepemimpinan Aa Umbara-Hengki Kurniawan dengan visi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi) pada 20 September baru masuk sekitar 30 persen. Hal itu membuat Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengaku belum puas dengan hasil kinerja manajerial di masing-masing SKPD. (Muhammad Zein,2019). Padahal salah satu prinsip Akuntabilitas yakni akuntabilitas finansial ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk melaporkan segala yang menjadi pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar (Mahmudi, 2013:9).

Fenomena ketiga Terjadi di Kabupaten Bandung Barat yakni tidak optimalnya kinerja manajerial karena Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 menyisakan angka yang cukup signifikan. Hal itu menjadi sorotan DPRD Kabupaten Bandung Barat. "Banyak pekerjaan yang mepet akhir tahun, sehingga tidak terkejar. Akhirnya, menyebabkan silpa," ujar Samsul Maarif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat. (Cecep Wijaya.2018). Padahal salah satu standar dasar kinerja manajerial adalah menentukan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan dalam Penjadwalan

melihat kondisi waktu sekarang dan yang akan datang terhadap program kerja agar terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Wijayanti, 2018 : 66).

Beberapa penelitian terdahulu yang terdahulu terkait dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran yakni Desy Amalia Candrakusuma (2017) menyatakan bahwa sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD selain itu Petriana Heski dkk (2017) menyatakan bahwa sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sementara itu terkait dengan pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD menurut Asrini (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas public berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD . Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas yang dimiliki SKPD, maka kinerja manajerial SKPD ikut mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD studi kasus Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Serapan anggaran pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih dibawah target dan terdapat anggaran yang belum terealisasikan.

2. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang pro aktif menyampaikan hasil kinerja dalam satu tahun.
3. Tidak optimalnya kinerja pemerintah daerah yang menyisakan angka yang cukup signifikan.

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Sampel yang digunakan dalam penelitian ini *relative* kecil yakni kurang dari 100 responden dikarenakan kesulitan memperoleh data.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar Pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Kinerja Manjerial SKPD daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manjerial SKPD daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan melalui pembuktian bagaimana Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD daerah kabupaten bandung barat .

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Kinerja Manjerial SKPD daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manjerial SKPD daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap kinerja manajerial SKPD sehingga tercipta pemerintahan yang lebih baik lagi.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan penelitian ini secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

